DAFTAR PUSTAKA

Ariadi Andi, 2019 Perencanaan Desa, Maraja Journal Vo.2 No.2, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tentang+RPJM+Desa&btnG=dikutip 8 Oktober 2025

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul: Terampil Mengolah Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta

Dadang Juliantara, 2002. Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Koentjaraningrat, 2009 Pengantar Antropologi, Jakarta, Rineke Cipta

LGSP. 2007. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Bag. 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Seri Perencanaan Partisipatif. Jakarta: USAID.

Masta'ana, 2015, Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Jurnal

Maro, 1998, Masyarakat Sebagai Sebuah Tempat Bersama-Sama, Jakarta, Cipta Prima.

Prasetya, T.I. 2008. Partisipasi dan Legal Draft. Malang: Wordpress.

Ranggy D.F Sumarauw, dkk, 2019, Analisis Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa di Desa Boalngitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jurnal Emba, Vol.7 No.5

Salusu J, 1998, Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta: Grasindo

Sumarto dan Hetifa Sj. 2003."Inovasi, Partisipasi dan *Good governance*". Bandung: Yayasan Obor Indonesia

Sumpeno, W. 2004. Perencanaan Desa Terpadu; Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat. Jakarta: CRS Indonesia.

Sutopo dan Dwi Tiyanto, 2014, Judul penelitiannya Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal

_____. 2013. Peranan Pragmatik Dalam Penyusunan RPJP Daerah, Desertasi, Pasca Sarjana UNS.

Turindra, A. 2009. Pengertian Partisipasi. Turindra Corporation Indonesia.

Edwinda Yuniati, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Studi Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Skripsi. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/115499/2/ COVER_DKK.pdf. di Kutip. 7 Oktober 2025.

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa